



PARTISIPASI MEMBENTUK HUBUNGAN ANTARA ASPEK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

Dimas Emha Amir Fikri Anas, Supami Wahyu Setiyowati

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Surel: dimas@unikama.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume 7
Nomor 2
Halaman 119-128
Samata, Desember 2021

ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
16 Juni 2021

Tanggal Diterima:
9 Agustus 2021

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa disebut berkualitas apabila memenuhi aspek transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa, yang menggunakan data primer, dengan sampel sebanyak 54 responden. Teknik analisis data menggunakan PLS yang menguji pengaruh variabel Akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa dimoderasi partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi berpengaruh terhadap dana dana desa. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dimoderasi partisipasi masyarakat. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa tidak dimoderasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini berimplikasi kepada para pengelola dana desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta berkinerja baik. Bagi masyarakat akan dapat digunakan sebagai media pengawasan dari pelaksanaan pemerintah desa setempat.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pengelolaan dana desa

The managements of villages funds is considered to be qualified whether fulfilling transparent and accountable aspects. This study aims to see the effect of accountability and transparency on the management of village funds that uses primary data, with a sample of 54 respondents. The data analysis technique used PLS which tested the influence of the accountability and transparency variables on the management of village funds moderated by community participation. The results showed that accountability had an effect in the management of village funds. Transparency affects village funds. Accountability affects the management of village funds moderated by community participation. Transparency affects the management of village funds not moderated by community participation. This research's implication is for village fund managers in Ngabang sub-district, Landak district, West Kalimantan Province, to be able to provide transparent and accountable financial reporting and perform it well. For the community, it can be used as a monitoring tool for the implementation of the local village government.

Keywords: *accountability, transparency, participation, village fund management.*

Copyright: Anas, Dimas E. F. dan Supami Wahyu Setiyowati (2021). Partisipasi Membentuk Hubungan Antara Aspek Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (119-128). doi 10.24252/jiap.v7i2.26833

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu topik menarik lima tahun ini, mengingat dana desa merupakan penterjemahan Visi Misi ke-4 dan ke-5 Presiden Jokowi untuk Indonesia Tahun 2019- 2024 yaitu reformasi birokrasi dan APBN yang tepat sasaran. Visi Misi tersebut adalah kelanjutan dan pemajuan dari Nawacita pada periode sebelumnya, dimana pemerintah membangun Indonesia mulai dari desa dan daerah pinggiran dalam rangka membuka jalan bagi terbangunnya pondasi struktur ekonomi yang berdaya saing dan upaya mendorong peningkatan perekonomian desa (Klc.kemenkeu, 2019). Namun demikian, agar pengelolaan dana desa sesuai maksud serta sasaran, maka pengelolaan dana desa harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip “good governance” agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Rustiarini & Denpasar, 2016); (Astuti & Yulianto, 2016); (Fajri, 2015); (Subroto, 2019).

Menurut Pemerintahan (2010) dan (*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010*, 2010), laporan keuangan dikatakan berkualitas ialah laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan dimana mengacu pada ukuran- ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi. Ukuran normatif laporan keuangan tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Masalah yang sering muncul yang berkaitan dengan laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) di tingkat nasional diklasifikasikan menjadi dua, yaitu masalah aspek pembinaan dan aspek pengawasan, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam kegiatan kajian hasil pemeriksaan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2015 sampai semester I tahun 2018 di seluruh Indonesia yang diungkapkan oleh Bapak Sartono.

Banyak desa-desa fiktif yang telah diungkapkan keberadaannya dinilai menjadi citra buruk pengawasan dalam pengelolaan dana desa oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dipilih oleh peneliti sebagai objek seperti halnya dengan desa lain yang sudah menerima dana suntikan dari pemerintah pusat atau daerah. Peneliti memilih Kecamatan Ngabang sebagai tempat penelitian karena peneliti menemukan terjadi dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa. Temuan menarik ini berdasarkan tulisan Media Cetak ((Ruai.tv08-03-2019), 2019), menuliskan Polres Landak saat ini menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dibantu oleh BPK RI dalam mengusut kasus Anggaran Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum ASN Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada anggaran Dana Desa yang di alokasikan tahun 2017, telah diserahkan dana dari 156 desa sebesar Rp7.200.000,- kepada DSPMPD Landak. Kegiatan penginputan data APBD ke dalam aplikasi sistem keuangan desa yang

dikuti oleh operator desa dan bendahara desa merupakan realisasi atas penggunaan dana desa tersebut pada Agustus 2017. Isu-isu yang dikemukakan tersebut adalah bukti tidak terpenuhinya aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dan transparansi artinya keterbukaan. Adanya transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan desa. Dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan instansi yang baik dan berpihak kepada masyarakat (Putra & Rasmini, 2019); (Risya & Nurodin, 2017); (Ultafiah, 2017). Hal ini sejalan dengan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019), bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, sustainable, partisipasif dan dapat dinikmati masyarakat merupakan prinsip-prinsip pembangunan pedesaan. Selain itu dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelola instansi akan bekerja sesuai dengan peraturan dan pada akhirnya akan menghasilkan kinerja karena terdapat pengawasan dari masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa dipengaruhi signifikan oleh Akuntabilitas. Akuntabilitas yang semakin tinggi, maka pengelolaan dana desa akan semakin baik. (Sukmawati & Nurfitriani, 2019); (Saragih, 2019); (Risya & Nurodin, 2017); (Ultafiah, 2017)

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu topik menarik lima tahun ini, mengingat dana desa merupakan penterjemahan Visi Misi ke-4 dan ke-5 Presiden Jokowi untuk Indonesia Tahun 2019- 2024 yaitu reformasi birokrasi dan APBN yang tepat sasaran. Visi Misi tersebut adalah kelanjutan dan pemajuan dari Nawacita pada periode sebelumnya, dimana pemerintah membangun Indonesia mulai dari desa dan daerah pinggiran dalam rangka membuka jalan bagi terbangunnya pondasi struktur ekonomi yang berdaya saing dan upaya mendorong peningkatan perekonomian desa (Klc.kemenkeu, 2019). Namun demikian, agar pengelolaan dana desa sesuai maksud serta sasaran, maka pengelolaan dana desa harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip “good governance” agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Rustiarini & Denpasar, 2016); (Astuti & Yulianto, 2016); (Fajri, 2015); (Subroto, 2019).

Menurut (Pemerintahan, 2010) dan (*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010*, 2010), laporan keuangan dikatakan berkualitas ialah laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan dimana mengacu pada ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi. Ukuran normatif laporan keuangan tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Masalah yang sering muncul yang berkaitan dengan laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) di tingkat nasional diklasifikasikan menjadi dua, yaitu masalah aspek pembinaan dan aspek

pengawasan, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sartono anggota yang merupakan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPRI RI yang disampaikan pada hasil pemeriksaan (BPK) RI berupa kajian pada semester I tahun 2018 anggaran 2015 pada Kegiatan Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia.

Banyak desa-desa fiktif yang telah diungkapkan keberadaannya dinilai menjadi citra buruk pengawasan dalam pengelolaan dana desa oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA). Pada penelitian ini, peneliti memilih desa-desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan barat. Desa-desa di Kecamatan Ngabang sama seperti desa lainnya yang mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peneliti memilih Kecamatan Ngabang sebagai tempat penelitian karena peneliti menemukan terjadi dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa. Temuan menarik ini berdasarkan tulisan Media Cetak ((Ruai.tv08-03-2019), 2019), menuliskan Polres Landak saat ini yang dibantu oleh BPK RI dalam megusut kasus Anggaran Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum ASN Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada anggaran Dana Desa yang di alokasikan tahun 2017, telah diserahkan dana dari 156 desa sebesar Rp7.200.000,- kepada DSPMPD Landak. Kegiatan penginputan data APBD ke dalam aplikasi sistem keuangan desa yang dikuti oleh operator desa dan bendahara desa merupakan realisasi atas penggunaan dana desa tersebut pada Agustus 2017. Isu-isu yang dikemukakan tersebut adalah bukti tidak terpenuhinya aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dan transparansi artinya keterbukaan. Adanya transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan desa. Dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan instansi yang baik dan berpihak kepada masyarakat (Putra & Rasmini, 2019); (Risya & Nurodin, 2017); (Ultafiah, 2017). Hal ini sejalan dengan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019), bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, sustainable, partisipasif dan dapat dinikmati masyarakat merupakan prinsip-prinsip pembangunan pedesaan. Selain itu dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelola instansi akan bekerja sesuai dengan peraturan dan pada akhirnya akan menghasilkan kinerja karena terdapat pengawasan dari masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai hubungan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa (Sukmawati & Nurfitriani, 2019); (Saragih, 2019); (Risya & Nurodin, 2017); (Ultafiah, 2017), dengan perbedaan hasil beberapa peneliti dengan variabel yang sama. Adanya partisipasi masyarakat sebagai variable moderasi, selain lokasi penelitian merupakan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan oleh penerima Amanah kepada pemberi Amanah, hingga kinerja pelaksanaan kegiatan dirasa puas oleh pemberi Amanah. Fokus utama dari akuntabilitas keuangan yaitu akurat dan tepat waktunya laporan, yang umumnya berupa audit atas laporan secara profesional atas penggunaan dana publik. (Nuritomo & Rossieta, 2014). Adanya akuntabilitas diyakini pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan sebaik-baiknya, hal ini dikarenakan pemerintah desa mengharapkan adanya kepercayaan dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah. Dengan penerapan konsep akuntabilitas bisa menghasilkan pengelolaan instansi yang baik dan berpihak kepada masyarakat (Putra & Rasmini, 2019); (Risya & Nurodin, 2017); (Ultafiah, 2017). Maka hipotesis sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

Aspek transparansi merupakan komponen yang sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan desa. Semua bukti pendapatan dan belanja harus transparan dan bisa ditelusur. Laporan keuangan desa harus bisa dilihat secara transparan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian (Putra & Rasmini, 2019); (Risya & Nurodin, 2017); (Ultafiah, 2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh pada pengelolaan dana desa. Dengan adanya pengelolaan dana desa lebih baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh dalam pengelolaan dana desa

Akuntabilitas merupakan aspek yang harus ada dalam pengelolaan dana keuangan dana desa. Pengelolaan dana desa harus menerapkan prinsip Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan suatu pengelolaan dana desa adalah suatu kewajiban. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasinya pada program perencanaan untuk mencapai tujuan yaitu program atau proyek pembangunan desa.. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi diharapkan fungsi pengawasan dan kontrol dari masyarakat dalam mengawal pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya aspek Akuntabilitas dan aspek partisipasi masyarakat (Halim & Iqbal, 2012). Maka dipotesis yang dirumuskan:

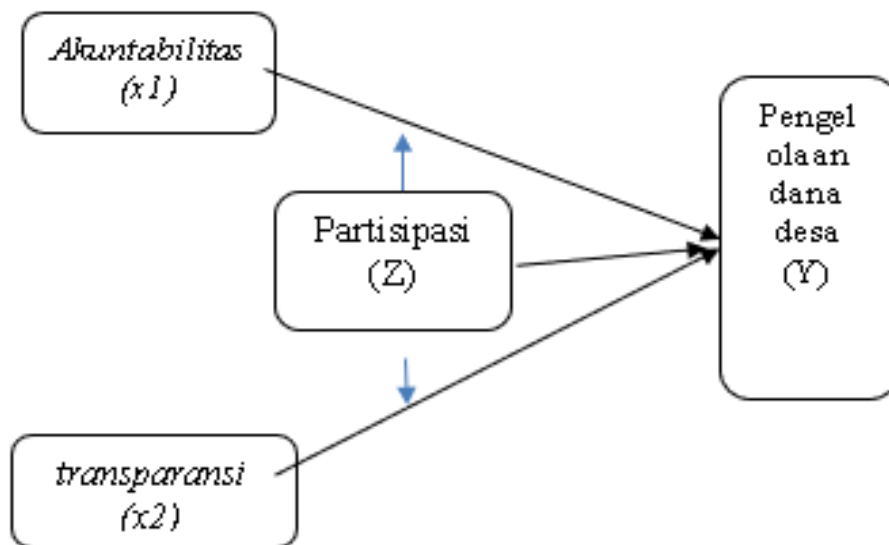
H3 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dimoderasi partisipasi

Transparansi ialah salah satu prinsip yang harus ada pada pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana pendapatan dan pengeluaran harus bisa ditelusur dan diperlihatkan kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana desa ditujukan agar tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Dwiyanto, 2015). Aspek transparansi dibarengi partisipasi masyarakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat diyakini pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya tanpa adanya kecurangan, hal ini dikarenakan masyarakat ikut terlibat

dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan pemerintah desa. Maka hipotesis yang dirumuskan :

H4: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dimoderasi partisipasi agresivitas pajak.

Gambar 1.
Model Penelitian



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2021)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif, yakni sesuai penggunaan meneliti populasi berypa sampel tertentu, instrument penelitian digunakan untu mengumpulkan data, berupa data kuantitatif atau statistik dalam kaitannya menguji hipotesis (Sugiyono, 2018). Desa kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat merupakan populasi pada penelitian ini. Sampel penelitian menggunakan 9 desa dengan responden 54 orang. Satu desa 9 orang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendaraha , BPD, dan 2 perwakilan masyarakat. Metode pengambilan sampel digunakannya sampel jenuh, seperti digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Sampel

No	Unit Kerja	Populasi/Sampel
1	Kepala Desa	9

2	Sekretaris Desa	9
3	Bendahara Desa	9
4	BPD	9
5	Perwakilan Masyarakat	18
	Jumlah	54

Teknik pengumpulan data melalui pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang digunakan dalam diperolehnya informasi dari responden. Sedangkan Jenis dan Sumber data adalah terdiri data data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data menggunakan Smart PLS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji validitas dan Reabilitas

Tabel 2
Outer Model

Indicator	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Efek Moderasi (Akuntabilitas)	1.000	1.000	1.000
Efek Moderasi (Transparansi)	1.000	1.000	1.000
Pengelolaan	0.805	0.874	0.636
Akuntabilitas	0.867	0.896	0.553
Transparansi	0.848	0.893	0.627

Sumber data diolah tahun 2020

Sesuai tabel 2 nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability lebih dari 7 bermakna data dalam penelitian reabel . Nilai AVE lebih 0,5 bermakna data penelitian ini valid.

Tabel 3
Pengujian Goodness of Fit

R Square	R Square Adjusted

Pengelolaan 0,666 0,631

Sumber data diolah tahun 2020

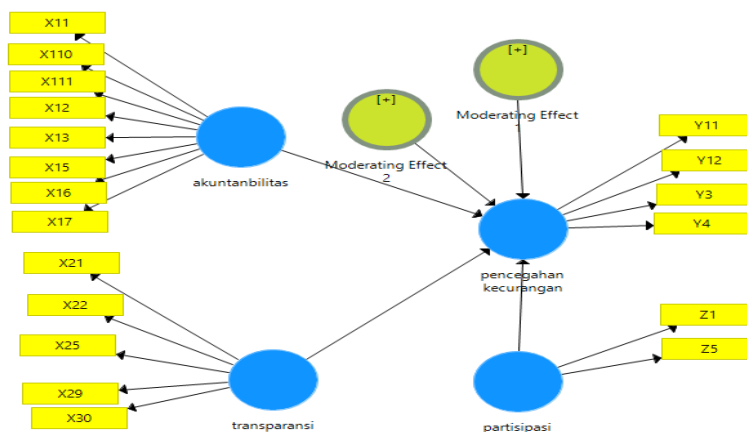
Hasil sesuai tabel 3 menjelaskan nilai predictive-relevance 0,666 ataupun 66,6%. Nilai predictive relevance 38,8% berindikasi informasi yang didapatkan pada data 66,6% dapat dijelaskan model tersebut.

Tabel 4
Pengujian hipotesis

	Koefisien jalur	T statistik	P value	keterangan
Efek Moderasi (Akuntabilitas)- -pengelolaan	0.314	3.218	0.001	diterima
Efek Moderasi (Transparansi-- -pengelolaan	0.086	0.739	0,460	ditolak
Akuntabilitas--- --Pengelolaan	0.291	2.424	0.016	diterima
Transparansi--- -- Pengelolaan	0.315	2.569	0.010	diterima

Sumber data diolah tahun 2020

Gambar 2.
Diagram Jalur Model Struktural dalam PLS



Sumber: Olah Data Peneliti

PENUTUP

1. Kesimpulan

Akuntabilitas serta transparansi berpengaruh pada pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Pengelolaan dana desa yang transparan adalah pengelolaan dana desa, dalam hal tersebut berhubungan dengan bukti bukti atas keuangan desa bisa ditelusur. Partisipasi masyarakat meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat terhadap program program yang dibiayai dana desa bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana desa. Partisipasi masyarakat belum meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. Masyarakat desa belum aktif berpartisipasi dalam transparansi pengelolaan dana desa.

2. Saran

Para pengelola dana desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat perlu mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui proses pengawasan tetapi juga mulai proses perencanaannya. Bagi masyarakat, keterlibatan ini menjadi bukti pemberdayaan masyarakat desa oleh para perangkat desa dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan dana desa. Bagi penulis selanjutnya dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan dana desa sesuai karakteristik wilayah atau obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ruai.tv08-03-2019). (2019). *Media Cetak (Ruai.tv08-03-2019)*.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol. 1, No.*
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No, 1099–1104*.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Klc.kemenkeu. (2019). *Klc.kemenkeu*.
- Nuritomo, & Rossieta, H. (2014). *Politik Dinasti, Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. SNA 17 Makalah Nomor*

173.

- Pemerintahan, K. S. A. (2010). *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010*. (2010).
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 132–158.
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, Vol. 6, No, 74–80.
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.
- Saragih, I. A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2, No.
- Subroto, A. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Doctoral Dissertation Universitas Diponegoro*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM*, Vol. 2, No, 52–66.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang*.